



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Tugas Dinas Pangan adalah membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1. diatas Dinas Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan;
dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



2.1.3. Struktur Organisasi

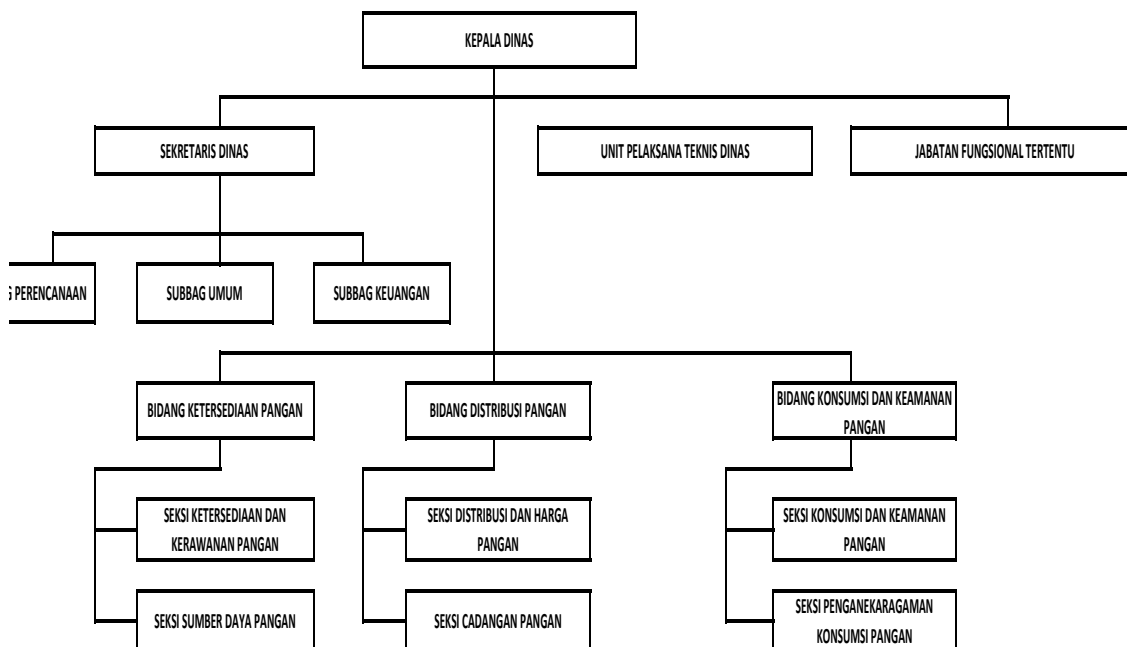
Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi
 - 1. Subbag. Perencanaan;
 - 2. Subbag. Umum;
 - 3. Subbag. Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahi
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Pangan.
- d. Bidang Distribusi Pangan, membawahi
 - 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - 2. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi
 - 1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan ditampilkan pada Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PERDA NO. 18 TAHUN 2016



2.2. Sumber Daya Dinas Pangan Provinsi

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya bidang pangan baik kualitas maupun kuantitas sangat dibutuhkan dalam rangka mensukseskan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu bentuk pengembangan ketahanan pangan diarahkan dengan menciptakan sumberdaya manusia yang ahli, terampil, bermutu serta merata dan tercukupi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan urusan pangan masyarakat.

Pada tahun 2017 data pegawai Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 38 pegawai, dengan kualifikasi pendidikan, golongan ruang dan jenis kelamin seperti ditampilkan pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pangan berdasarkan Jenis Kelamin,
Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e											
	IV/d			1								1
	IV/c											
	IV/b		1	1								2
	IV/a											
	Jumlah		1	2								3
2	III/d	1		1					1			3
	III/c		1	2								3
	III/b			7	1	2						10
	III/a											
	Jumlah	1	1	10	1	2			1			16
3	II/d											
	II/c								2			2
	II/b											
	II/a								1			1
	Jumlah								3			3
Jumlah (lk)		1	2	12	1	2	0	0	4	0	0	22
No	Golongan	Perempuan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e											
	IV/d											
	IV/c											
	IV/b		2									2
	IV/a		3									3
	Jumlah		5									5
2	III/d			3								3
	III/c			2								2
	III/b			2		1						3
	III/a			2								
	Jumlah			9		1						10
3	II/d					1						1
	II/c											
	II/b											
	II/a											
	Jumlah					1						1
Jumlah (Pr)		0	5	9	0	2	0	0	0	0	0	16
Jumlah Total		1	7	21	1	4	0	0	4	0	0	38

Sumber : Dinas Pangan (2017)



Jumlah pegawai Dinas Pangan berdasarkan jabatan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sedangkan rincian pegawai menurut jabatan struktural/fungsional tertentu dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4

Tabel. 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung

No	Uraian	Golongan IV						Golongan III					Jml Semua
		E	D	C	B	A	Jml	D	C	B	A	Jml	
1	Struktural		1		4	3	8	6				9	17
2	Fungsional								1	3	1	4	4
3	F. Umum								4	10	1	14	14
4	CPNS												0
Jumlah		0	1	0	4	3	8	6	5	13	2	27	35
No	Uraian	Golongan II						Golongan I					Jml Semua
			D	C	B	A	Jml	D	C	B	A	Jml	
1	Struktural		1	2			3						3
2	Fungsional												0
3	F. Umum												0
4	CPNS												0
Jumlah		0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3

Tabel. 2.3.

Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Belum Terisi	Keterangan
1	Eselon II	1	-	
2	Eselon III	4	-	
3	Eselon IV	9	-	
4	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	
5	a. Perencana	1	-	
	c. AKP	2	-	
	b.PMHP	3	-	



Tabel. 2.4.

Rincian Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
Jumlah Pegawai	1	7	21	1	4	0	0	4	0	0	38

2.2.2. Aset/Modal

Kondisi aset/modal yang dimiliki Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 berupa peralatan kantor sejumlah 49 jenis peralatan dengan total 258 unit serta perlengkapan kantor sejumlah 10 jenis dengan total 700 unit beserta keterangan kondisi layak dan tidak layak. Data asset Dinas Pangan ditampilkan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Aset Dinas Pangan dan Kondisinya

No	Jenis Barang	Jumlah Aset 2017	Kondisi Aset 2017		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
A	Peralatan Kantor	258	210	48	
1	Minibus	4	4		
2	Sepeda Motor	9	9		
3	Alat pengolahan tanah dan tanaman lain-lain	1		1	
4	Mesin Ketik Manual Standar (14 - 16)	2	1	1	
5	Lemari Besi	18	18		
6	Filing Besi/Metal	17	17		
7	Brand Kas	3	3		
8	Lemari Kaca	2	2		
9	Lemari Kayu	3	3		
10	White Board	2	2		
11	Meja Kayu	8	6	2	
12	Meja Panjang	2	2		
13	Kursi Rapat	18	17	1	



A	Peralatan Kantor				
14	Kursi Putar	17	12	5	
15	Meja Komputer	6	4	2	
16	Meja Biro	31	30	1	
17	Sofa	3	2	1	
18	Gordyn	1	1		
19	Rak TV	2	1	1	
20	Lemari Es	2	2		
21	AC Unit	12	10	2	
22	Kompas Gas	1	1		
23	Tabung Gas	1	1		
24	Televisi	2	2		
25	Tiang Bendera	1	1		
26	PC Unit/Komputer PC	12	10	2	
27	Laptop	7	6	1	
28	Note Book	3	3		
29	Printer	11	4	7	
30	UPS	11	8	3	
31	Router	1	1		
32	Antena	2	2		
33	Meja Kantor Pejabat Ess II	1	1		
34	Meja Kantor Pejabat Ess III	4	2	2	
35	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1	1		
36	Kursi Kerja Pejabat Ess III	4	2	2	
No	Jenis Barang	Jumlah Aset 2017	Kondisi Aset 2017		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
37	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	10	10		
38	Papan Nama Instansi	1		1	
39	Mesin Absensi	1		1	
40	Electric Generating Set lain-lain	1		1	
41	Camera + Attachment	3	2	1	
42	Proyektor + Attachment	1	1		
43	Profesional Sound System	1	1		
44	Telephone (PABX)	1	1		
45	Facsimile	1	1		
46	Microphone/Wireless Mic	2		2	
47	Handycam	1		1	
48	Handphone	8		8	
49	Kipas Angin	2		2	



B	Perlengkapan Kantor	700	700		
	Buku dan Perpustakaan	698	698		
1	Ilmu Pengetahuan Umum	60	60		
2	Encyclopedia, Kamus Buku Referensi	10	10		
3	Agama Islam	1	1		
4	Ekonomi	5	5	1	
5	Hukum	83	83		
6	Teknologi	129	129		
7	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	408	408		
8	Management Perkantoran	2	2		
	Barang Bercorak Kebudayaan	2	2		
1	Gambar Presiden/Gubernur	1	1		
2	Lambang Garuda	1	1		

2.3. Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/ OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti dituangkan dalam Tabel 2.6, sedangkan Tabel 2.7 menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan.



Tabel 2.6.
Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 2012 - 2017

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi capaian Tahunan					Rasio capaian pada tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran1: Meningkatnya jumlah cadangan pangan pemerintah																			
1.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)				200	200	200	200	200	0	0	50	23	54	0	0	50	23	54
Sasaran 2: Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat																			
2.	Skor Pola Pangan Harapan (skor)				83,90	87,10	90,30	93,5	95	87,7	88,2	88,0	88,17		1,045	1,012	0,97	0,94	
Sasaran 3: Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen																			
3.	Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi				40	45	50	55	63	1	3	0	11	20	0,025	0,066	0	0,2	0,317
Sasaran 4 : Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi masyarakat																			
4.	Meningkatnya ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%CC=1)				75	80	85	90	95	1	1	1	1	1	0,013	0,0125	0,011	0,011	0,010
Sasaran 5 : Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan																			
5.	Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun (desa)				3	3	3	3	3	85	87	93	95	2	28,33	29	31	1	0,021
6.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan (desa)				3	3	3	3	3	35	92	342	822	2	11,66	30,66	114	274	0,002



Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 854.852.625	Rp 1.235.900.000	Rp 580.540.000	Rp 1.306.102.500	Rp 1.209.449.850	Rp786.062.853	Rp1.136.193.826	Rp943.171.581	Rp1.265.495.500	Rp 825.890.451	91,95%	91,93%	162,46%	96,89%	68,29%	Rp 5.186.844.975	Rp4.956.814.211
Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur	Rp 812.260.000	Rp 371.710.000	Rp 278.790.000	Rp 455.000.000	Rp 34.428.000	Rp 507.580.000	Rp 325.271.300	Rp 202.817.000	Rp 400.016.600	Rp 33.366.000	62,49%	87,51%	72,75%	87,92%	96,92%	Rp 1.952.188.000	Rp1.469.050.900
Program PeningkatanDisiplinAparatur	Rp 48.800.000	Rp -	Rp 20.000.000	Rp 6.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 153.430.000	Rp -	0,00%	#DI V/0!	0,00%	2360,46%	#DI V/0!	Rp 75.300.000	Rp153.430.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 91.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 63.132.701	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,38%	Rp 91.000.000	Rp63.132.701
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 188.265.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.895.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	Rp 188.265.000	Rp22.895.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rp 3.013.397.000	Rp 2.172.147.000	Rp 5.548.540.600	Rp 3.872.685.000	Rp 3.229.049.150	Rp 2.512.670.725	Rp 1.906.216.780	Rp 2.664.301.528	Rp 3.462.461.850	Rp 576.847.775	83,38%	87,76%	48,02%	89,41%	17,86%	Rp 17.835.818.750	Rp11.122.498.658
Belanja Tidak Langsung	Rp 3.113.089.450	Rp 3.572.442.394	Rp 3.785.408.394	Rp 4.794.927.064	Rp 448.024.531.214	Rp 2.983.614.392	Rp 3.382.161.503	Rp 3.538.149.950	Rp 4.421.682.021	Rp 4.042.532.613	95,84%	94,67%	93,47%	92,22%	0,90%	Rp 463.290.398.516	Rp18.368.140.479



1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (ton);
2. Skor Pola Pangan Harapan (Skor);
3. Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi;
4. Meningkatnya ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%);
5. Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 (tiga) desa per tahun; dan
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan (desa).

1. Cadangan Pangan Pemerintah

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan salah satu upaya dalam pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan Pemerintah



kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.

Target Renstra Badan Ketahanan Pangan menetapkan sesuai nilai SPM sejumlah 200 ton/tahun. Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan mengingat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan sebagai wilayah produsen bahan pangan, yang menyebabkan cost yang dikeluarkan untuk penyediaan cadangan pangan menjadi begitu besar karena bersumber dari luar wilayah provinsi.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi baru dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 50 ton, sampai dengan akhir tahun 2015, tidak ada penyaluran bahan pangan dari cadangan pangan pemerintah. Pada tahun 2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami bencana alam yaitu banjir bandang di beberapa wilayah kabupaten/kota, sehingga untuk penanganan krisis pangan saat bencana terjadi, dilakukan penyaluran cadangan pangan berupa beras sejumlah 27 ton, sehingga jumlah cadangan pangan di akhir tahun 2016 sejumlah 23 ton. Pada tahun 2017 dalam kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah dianggarkan pengadaan cadangan pangan, dengan kondisi diawal tahun 2017 cadangan pangan pemerintah sebanyak 54 ton.

Selain kegiatan yang diarahkan ke pengadaan cadangan pangan pemerintah, dilaksanakan juga kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk:



- (a) meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun;
- (b) menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan, dan
- (c) sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat.

2. Skor Pola Pangan Harapan

Pola konsumsi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidratnya. Akibatnya konsumsi beras melebihi angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber karbohidrat dan protein dari sumber pangan lain masih rendah.

Keberhasilan sasaran diukur melalui indikator yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan Skor PPH. FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Upaya pencapaian Skor PPH didukung oleh 1(satu) program yaitu : Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/ Perkebunan.



Capaian skor PPH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebesar 88,17 (menurut data primer) dan 77,1 (menurut data Susenas). Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, perhitungan skor PPH Nasional berdasarkan data Susenas.. Skor PPH tersebut diatas skor PPH tahun sebelumnya yaitu 88,0 (data primer) tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 90,30. Secara nasional capaian skor PPH provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah Skor PPH Nasional yaitu sebesar 86 (data susenas). Permasalahan sulitnya mencapai target capaian skor PPH di Kepulauan Bangka Belitung adalah masih kurangnya konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan sayur dan buah-buahan dibandingkan dengan konsumsi kelompok pangan lainnya.

Tabel 2.8

Skor PPH Nasional dan Skor PPH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Kelompok Pangan	Skor PPH Nasional			Skor PPH Prov. Kep. Bangka Belitung			
		AKE	% AKG	Skor PPH	AKE	% AKG	AKP	Skor PPH
1	Padi-padian	1075	50,0	25,0	1375		31,1	22,0
2	Umbi-umbian	129	6,0	2,5	31		...	6,0
3	Pangan Hewani	258	12,0	24,0	196		18,0	24,0
4	Minyak dan lemak	215	10,0	5,0	290		0,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	64	3,0	1,0	107		1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	108	5,0	10,0	40		4,0	10,0
7	Gula	108	5,0	2,5	101		0,1	2,0
8	Sayur dan buah-buahan	129	6,0	30,0	91		3,4	30,0
9	Lain	64	3,0	0,0	48		2,2	0,0



Total				2277		60,1	
%				113,9%		115,7%	

Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan industri pangan lokal meliputi kegiatan pengembangan pangan lokal, pengkajian makanan tradisional, promosi pangan lokal, lomba cipta menu B2SA, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan, dan kegiatan promosi keamanan pangan.

3. Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi

Jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan persyaratan konsumen. Keamanan pangan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan yang ada, bagaimanapun tinggi nilai gizi suatu bahan pangan atau makanan, penampilannya baik juga lezat atau enak rasanya , tetapi bila tidak aman, maka makanan tersebut tidak ada nilainya lagi, sebaliknya makanan tersebut bukannya sehat yang didapat melainkan penyakit timbul sehingga mengganggu kesehatan. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk dapat menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik.

Sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan



yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyediakan pangan yang aman dan bermutu. Sedangkan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui partisipasi dalam penanganan pangan hasil pertanian baik ditahap budidaya, pasca panen, pengolahan primer maupun distribusinya.

Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan segar yang diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha dan pangan segar yang beredar aman dikonsumsi. Pengawasan pangan segar dapat dilakukan melalui pengambilan sampel pangan segar yang beredar dan dilakukan uji residu kimia/pestisida serta pemantauan terhadap penerapan standar budidaya yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP).

Di tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan produk pangan segar hasil pertanian untuk beberapa sampel produk pertanian. Uji produk pangan yang secara langsung dilakukan dengan menggunakan peralatan Rapid Test Kit. Hasil dari alat uji tersebut bersifat kualitatif artinya menunjukkan ada tidaknya kandungan bahan berbahaya di dalam pangan segar yang diuji. Adapun hasil pengujian sampel pangan segar menggunakan Rapid Test Kit ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8

Hasil Pengujian Sampel Pangan Segar Menggunakan Rapid
Test Kit Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016

No	Nama Produk	Asal Produk	Jenis Pengujian	Hasil Pengujian
1	Beras 811	Pangkalpinang	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
2	Beras Kapal Layar	Pangkalpinang	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
3	Beras Sendok	Pangkalpinang	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
4	Beras Walet	Pangkalpinang	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
5	Beras KTJ	Pangkalpinang	Bleaching Chlorine	POSITIF (+)
6	Beras Gareng	Pangkalpinang	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
7	Beras RM	Pangkalpinang	Bleaching Chlorine	POSTIF (+)
8	Beras Sendok 10 KG	Pasar Sungai Selan	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
9	Beras Sendok 40 KG	Pasar Sungai Selan	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
10	Beras RM 10 KG	Pasar Sungai Selan	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
11	Beras RM 40 KG	Pasar Sungai Selan	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
12	Beras AAA 40	Pasar Sungai Selan	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
13	Beras Merk AAA	Belitung Timur	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
14	Beras Merk Top	Belitung Timur	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
15	Beras Cap Kuda	Belitung Timur	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
16.	Beras Cap Matahari	Belitung Timur	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
17.	Beras 811	Pasar Sungailiat	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
18.	Beras Kapal Layar	Pasar Sungailiat	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
19.	Beras Sendok	Pasar Sungailiat	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
20.	Beras Walet	Pasar Sungailiat	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
21.	Buncis	Pasar Sungailiat	Residu Pestisida	Negatif (-)
22.	Wortel	Pasar Sungailiat	Residu Pestisida	Negatif (-)
23.	Tomat	Pasar Sungailiat	Residu Pestisida	Negatif (-)
24.	Kisi/Oyong	Pasar Sungai Selan	Residu Pestisida	Negatif (-)
25.	Sawi	Pasar Sungai Selan	Residu Pestisida	Negatif (-)
26.	Bayam	Pasar Sungai Selan	Residu Pestisida	Negatif (-)
27.	Cabe Besar	Pasar Sungai Selan	Residu Pestisida	Negatif (-)
28.	Kangkung	Pasar Sungai Selan	Residu Pestisida	Negatif (-)
29.	Kacang Panjang	Pasar Tanjung Pandan	Residu Pestisida	Negatif (-)
30.	Mentmun	Pasar Tanjung Pandan	Residu Pestisida	Negatif (-)
31.	Selada Putih	Pasar Tanjung Pandan	Residu Pestisida	Negatif (-)



32.	Cabe Rawit	Pasar Tanjung Pandan	Residu Pestisida	POSITIF (+)
33.	Cabe Merah	Pasar Tanjung Pandan	Residu Pestisida	POSITIF (+)
34.	Beras RM 10 KG	Pasar Muntok	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
34	Beras 811	Pasar Muntok	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
35	Beras Gareng	Pasar toboali	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
36	Beras RM	Pasar toboali	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
37	Beras Merk AAA	Pasar Tanjung Pandan	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
38	Beras Merk Permata	Pasar Tanjung Pandan	Bleaching Chlorine	Negatif (-)
39	Tomat	Pasar Manggar	Residu Pestisida	Negatif (-)
40	Bayam	Pasar Manggar	Residu Pestisida	Negatif (-)
41	Terong	Pasar Manggar	Residu Pestisida	Negatif (-)
42	Oyong	Pasar Manggar	Residu Pestisida	Negatif (-)
43	Gambas	Pasar Manggar	Residu Pestisida	Negatif (-)
44	Cabe Keriting	Pasar Manggar	Residu Pestisida	Negatif (-)
45	Kangkung	Pasar Manggar	Residu Pestisida	Negatif (-)

Di tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan uji analisis sampel pangan segar bekerja sama dengan Balai Pengujian Mutu Barang, Ciracas - Jakarta Timur. Uji sampel pangan segar diambil dari petani dan Pasar Modern/Tradisional sayuran yang ada di 6 (Tujuh) Kabupaten / 1 (satu) Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Total sampel yang diuji adalah sebanyak 30 sampel pangan segar

Jenis sampel pangan segar yang diuji untuk peningkatan mutu dan keamanan pangan segar dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di pasar/distributor dan petani adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Belitung

Sampel produk pangan segar yang diambil dari kabupaten Belitung yaitu sayuran dan buah meliputi: Cabe Keriting, Bayam, Sawi Manis, Terong Ungu dan Pisang Cavendis.

**2. Kabupaten Belitung Timur**

Sampel produk pangan segar yang diambil dari Kabupaten Belitung Timur yaitu sayuran meliputi : Cabe Keriting, Terong Ungu, Tomat, Gambas, dan Melon

3. Kabupaten Bangka

Sampel produk pangan segar yang diambil dari Kabupaten Bangka yaitu sayuran dan buah meliputi : Sawi Pahit, Jagung Manis, Kisi/Oyong, Ketimun, dan semangka

4. Kabupaten Bangka Tengah

Sampel produk pangan segar yang diambil dari Kabupaten Bangka Tengah yaitu sayuran dan buah meliputi : Daun Bawang, Kucai, Terong Putih, dan Jambu Air

5. Kabupaten Bangka Barat

Sampel produk pangan segar yang diambil dari Kabupaten Bangka Barat yaitu sayuran meliputi: Sawi, Kangkung, Tomat, dan Semangka

6. Kabupaten Bangka Selatan

Sampel produk pangan segar yang diambil dari Kabupaten Bangka Selatan yaitu sayuran dan buah meliputi : Kangkung, Bayam, Buncis, dan Nanas

7. Kota Pangkalpinang

Produk pangan segar yang diambil dari Kota Pangkalpinang yaitu sayuran dan buah meliputi : Kangkung, bayam, Terong Ungu

Berdasarkan sampel produk pangan segar yang diuji, menunjukkan bahwa beberapa produk pangan tersebut masih terdapat kandungan cemaran bahan berbahaya baik kandungan logam berat seperti timbal dan kadmium maupun mikrobiologi seperti E Coli dan Salmonela. Kandungan



cemaran berbahaya tersebut terdapat pada semua lokasi pengambilan sampel di enam (6) kabupaten dan satu (1) kota, dengan kondisi beragam dari diambang batas maksimal sampai melampaui batas maksimal yang ditetapkan Standart Nasional Indonesia (SNI).

Hasil uji terhadap pangan segar yang beredar di pasar di 7 Kabupaten/kota di Pangkalpinang menunjukkan bahwa kondisi pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif mengkhawatirkan dari sisi keamanan pangan. Penanganan keamanan pangan perlu disikapi dengan pengawasan terhadap lokasi sumber-sumber pangan baik dari produsen, penyimpanan sampai ke jalur distribusi pangan tersebut. Kerjasama penanganan keamanan pangan segar juga diperlukan antar daerah terutama dengan provinsi penyuplai sumber pangan.

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi adalah kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian, peningkatan mutu dan keamanan pangan dan operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

4. Meningkatnya ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%);

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata di setiap wilayah. Gangguan distribusi pangan berdampak terhadap kelangkaan bahan pangan dan



kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun.

Pada tahun 2016 diperoleh informasi kondisi harga pangan di tingkat grosir, pengecer dan pasokan pangan yang secara umum menunjukkan:

- a) Kondisi harga pangan di pedagang grosir seperti harga jagung, kedelai, beras, bawang merah, telur ayam, daging ayam, daging, sapi hidup tingkat peternak pada bulan maret sampai dengan juni 2016 dalam kondisi stabil. Sedangkan harga cabe merah kriting, harga gula pasir, harga daging sapi tingkat pemotong dalam kondisi berfluktuatif tinggi/ tidak stabil/ bergejolak.
- b) Begitu juga di tingkat pedagang eceran pada bulan maret sampai dengan bulan juni harga pangan yang bergejolak atau tidak stabil adalah cabe merah kriting, gulai pasir, daging ayam.
- c) Kondisi harga pangan pada bulan Juli sampai dengan oktober dari bulan Juli sampai dengan oktober stabil, namun untuk cabe merah kriting dan daging ayam ras stabil dengan harga yang tinggi, begitu juga untuk pedagang di tingkat eceran.
- d) Untuk kondisi pangan dari 11 komoditi baik ditingkat pedagang grosir maupun pedagang eceran harga berfluktuatif tinggi (bergejolak) yaitu komoditi cabe merah kriting.

5. Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 (tiga) desa per tahun;

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) merupakan suatu kegiatan yang langsung menyentuh



masyarakat miskin di daerah rawan pangan dengan sasaran mengentaskan kemiskinan dan kerawanan pangan di kabupaten/kota yang memiliki desa rawan pangan. Pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas SDM, membuka akses pangan, dan membangun wilayah secara terpadu.

Kegiatan yang awalnya merupakan program stimulan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 ini dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan terhadap daerah dari aspek ketersediaan dan kerawanan pangan yang disebut dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), baik dalam skala nasional maupun provinsi.

Capaian Jumlah Desa Mandiri Pangan yang terbentuk pada tahun 2017 sejumlah satu (1) desa, dari tiga (3) desa yang ditargetkan terbentuk, yaitu Demapan Desa Paradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

Total jumlah desa mandiri pangan ditampilkan pada Tabel 2.9 yang sebagian besar pembentukannya melalui program BKP Kementerian Pertanian.

Tabel. 2.9 Lokasi Desa/Kawasan Mandiri Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan	Tahun	Desa/Kelurahan	Status Desa Pelaksana Program	Keterangan
1	Belitung					
	a.	Membalong	2006	Gunung Riting	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2006	Simpang Rusa	Reguler (inti)	Tingkat Kemandirian
			2010	Bantan	Replikasi	Tingkat Kemandirian

			2010	Lasar	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Padang Kandis	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2007	Membalong	Reguler (Inti)	Tingkat Kemandirian
			2009	Kembiri	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2011	Tanjung Rusa	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2011	Mentigi	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2011	Pulau Selu	Replikasi	Tingkat Kemandirian
	b.	Tanjungpandan	2008	Perawas	Reguler	Tingkat Kemandirian
	d.	Sijuk	2007	Terong	Reguler	Tingkat kemandirian
			2013	Sijuk	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Air Selumer	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Pelepak Pute	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Sungai Padang	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Tanjung Tinggi	Kawasan	Tahap Kemandirian
	e.	Badau	2013	Badau	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Kacang Botor	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Cerucuk	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Ibul	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Sungai Samak	Kawasan	Tahap Kemandirian
2	Bangka					
	a.	Puding Besar	2006	Labu	Reguler (Inti)	Tingkat Kemandirian
			2010	Kayu Besi	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Tanah Bawah	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Kota Waringin	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Saing	Reguler	Tingkat Kemandirian
	B	Riau Silip	2007	Berbura	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2007	Riding panjang	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2011	Cit	Replikasi	Tingkat Kemandirian
No	Kabupaten	Kecamatan	Tahun	Desa/Kelurahan	Status Desa Pelaksana Program	Keterangan
		Riau Silip	2011	Deniang	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2011	Pangkalniur	Replikasi	Tingkat Kemandirian
	c.	Bakam	2008	Mangka	Reguler	Tingkat Kemandirian
	d.	Mendo Barat	2006	Air Buluh	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2009	Labuh Air Pandan	Reguler	Tingkat Kemandirian
3	Bangka Selatan					



	a.	Payung	2006	Fajar Indah	Reguler (inti)	Tingkat Kemandirian
			2007	Gudang	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2011	Bangka kota	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2011	Sebagin	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2011	Rajik	Replikasi	Tingkat Kemandirian
	b.	Simpang Rimba	2007	Simpang Rimba	Reguler	Tingkat kemandirian
	c.	Lepar Pongok	2008	Kumbung	Reguler	Tingkat kemandirian
	d.	Pulau Besar	2006	Panca Tunggal	Reguler	Tingkat kemandirian
			2009	Sumber Jaya Permai	Reguler	Tingkat kemandirian
			2011	Batu betumpang	Replikasi	Tingkat kemandirian
			2011	Sidoharjo	Replikasi	Tingkat kemandirian
			2011	Sukajaya	Replikasi	Tingkat kemandirian
4	Kota Pangkalpinang					
	a.	Gerunggang	2006	Tuatunu	Reguler (Inti)	Tingkat Kemandirian
			2010	Bukit Besar	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Buki Merapin	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Taman Bunga	Replikasi	Tingkat Kemandirian
	b.	Bukit Intan	2006	Sriwijaya	Reguler (Inti)	Tingkat Kemandirian
			2007	Bacang	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2010	Semabung Lama	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Semabung Baru	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2010	Kejaksaan	Replikasi	Tingkat Kemandirian
			2009	Air Itam	Reguler	Tingkat Kemandirian
	c.	Rangkui	2007	Parit Lalang	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2012	Pintu Air	Reguler	Tahap Pengembangan
	d.	Pangkalbalam	2010	Ketapang	Reguler	Tingkat Kemandirian
	e.	Gabek	2008	Selindung	Reguler	Tingkat Kemandirian
5	Bangka Tengah					
	a.	Namang	2008	Baskara Bakti	Reguler	Tingkat Kemandirian
	b.	Sungaiselan	2008	Tanjungpura	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2011	Pasir Garam	Reguler	Tingkat kemandirian
No	Kabupaten	Kecamatan	Tahun	Desa/Kelurahan	Status Desa Pelaksana Program	Keterangan
	c.	Lubuk Besar	2009	Kulur Ilir	Reguler	Tingkat Kemandirian
			2013	Batu Beriga	Reguler	Tahap Pengembangan
			2014	Lubuk Besar	Reguler	Tahap Penumbuhan
	d.	Koba	2012	Padang Mulya	Reguler	Tahap kemandirian

			2013	Guntung	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Terentang	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Penyak	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Kurau	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Kurau Barat	Kawasan	Tahap Kemandirian
	e.	Pangkalan Baru	2012	Tanjung Gunung	Reguler	Tahap kemandirian
6.	Belitung Timur					
	a.	Gantung	2011	Lilangan	Reguler	Tingkat kemandirian
			2011	Lenggang	Reguler	Tingkat kemandirian
	b.	Dendang	2012	Balok	Reguler	Tahap Pengembangan
	c.	Simpang Pesak	2013	Tanjung Batu Itam	Reguler	Tahap Pengembangan
			2013	Simpang Pesak	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Dukong	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Tanjung Kelumpang	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Tanjung Batu Itam	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Simpang Pesak	Kawasan	Tahap Kemandirian
	d.	Manggar	2014	Bentaian Jaya	Reguler	Tahap Penumbuhan
	e.	Damar	2013	Sukamandi	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Mengkubang	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Burong Mandi	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Mempaya	Kawasan	Tahap Kemandirian
			2013	Air Kelik	Kawasan	Tahap Kemandirian
7	Bangka Barat					
	a.	Simpang Teritip	2016	Paradong	Reguler APBD	Tahap Penumbuhan
	Jumlah Demapan				89 desa	
	Reguler				41 desa	
	Replikasi				24 desa	
	Kawasan				24 desa	

6. **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan (desa).**

Program desa mandiri pangan dilaksanakan mempunyai pengaruh yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tahapan program yang berkesinambungan dimulai dari tahap penumbuhan desa mandiri pangan, tahap pengembangan, tahap kemandirian, serta sampai tingkat kemandirian. Tahapan-tahapan tersebut memberikan ruang bagi berkembangnya jenis dan skala usaha masyarakat yang tergabung dalam kelompok binaan Desa Mandiri Pangan. Pembinaan yang dilakukan



terhadap desa mandiri pangan yang terbentuk diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan penguasaan dan akses sumber daya. Dengan mensiasati persoalan teknis dan jalan keluar strategis untuk mendorong percepatan pengembangan ketahanan pangan tingkat desa melalui program ini diharapkan upaya penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Capaian Tingkat pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud dimasa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan, dengan kondisi ketersediaan pangan sangat tergantung dari luar provinsi. Ketersediaan bahan pangan pokok yang bersumber dari produksi lokal pada tahun 2016 sebesar 14% dari total ketersediaan pangan yang beredar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingkat inflasi masih sangat tinggi dan kurangnya



stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen.

2. Belum terlaksananya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan dengan baik.
3. Masih terdapatnya desa tertentu yang harus mendapatkan penanganan daerah rawan pangan.
4. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan untuk mendapatkan pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal, karena kebiasaan sejak kecil.
5. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang kurang konsisten dalam berpartisipasi untuk mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
6. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas pekerjaan.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Adanya program pusat yang menunjang pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah seperti KRPL, TTI, Desa Mandiri Pangan, UPSUS Pajale dan UPSUS Peternakan dalam meningkatkan ketersediaan pangan.
2. Besarnya jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.



3. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
4. Ketersediaan sumberdaya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal.
5. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragamanhayati baik flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan onsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya.
6. Adanya dana dari APBN dan APBD yang mendukung kebijakan, program dan kegiatan prioritas pemantapan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal.



Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Merupakan provinsi kepulauan.
2. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar provinsi.
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
4. Masih terdapatnya KK miskin yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
5. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
6. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
7. Kurangnya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
8. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.



2. Luas wilayah Jawa Timur yang besar dan merupakan provinsi lumbung pangan serta menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar.
3. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
4. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal.
5. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya.
6. Ketersediaan lahan pertanian cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.
8. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
9. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.



Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi memiliki potensi untuk di tingkatkan guna mendukung pengembangan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan perbaikan konsumsi pangan. Disisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan. Adapun tantangan dan peluang dari aspek ketahanan pangan :

1. Ketersediaan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang ada dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Dinas Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan tersebut, yaitu berperan pada :

- a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan, dan penanganan kerawanan pangan;



- b. Penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan;
- c. Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan;
- d. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

2. Distribusi Pangan

Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup sarana dan prasarana, kelembagaan pemasaran, pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Kelembagaan pemasaran hasil – hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan khususnya di wilayah – wilayah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen, sebaliknya peningkatan harga secara tajam pada musim paceklik.

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada :

- a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan;
- b. Penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan dan;
- c. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

3. Konsumsi dan Keamanan Pangan



Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik. Kegiatan penganekaragaman dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sektor, Penganekaragaman pangan bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergisi, seimbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan tradisional. Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran serta teknologi pengolahan pangannya.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik akan memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan B2SA yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat untuk mencapai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang lebih baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan dalam dalam



penanganan keamanan pangan diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

4. Manajemen Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga. Keberadaan Dewan Ketahanan Pangan merupakan suatu peluang untuk mensinergikan berbagai macam program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dengan melibatkan anggota Dewan Ketahanan Pangan dan lintas sektor terkait sehingga akan tercapai suatu hubungan yang harmonis antara kabupaten/kota dan provinsi.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri dari tiga subsistem :

- a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk;
- b) Distribusi pangan yang lancar dan merata;
- c) konsumsi pangan untuk setiap kesehatan individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan.

Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, dalam pelaksanaa kebijakan program harus memerhatikan kebijakan PANCA YASA yaitu memfokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup :

- 1) pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya;
- 2) penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- 3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan tenaga penyuluh;



4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan;

5) penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya di pembangunan ketahanan pangan agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang strategis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumberdaya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Dengan melihat tantangan yang semakin berat pada 2017-2022, maka inventrisasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, pengkajian, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.



- b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.

2. Masalah yang bersifat eksternal

a. Ketersediaan dan kerawanan pangan

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah disebabkan beberapa kendala antara lain :

- 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
- 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
- 3) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan;
- 4) rusaknya prasarana pengairan penambangan timah;
- 5) kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang;
- 6) masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan.

b. Distribusi pangan dan cadangan pangan

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan movev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas. Permasalahan dalam aspek distribusi pangan meliputi belum terpolanya distribusi bahan pangan antarkab/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu pelabuhan yang tersebar di kabupaten/kota sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan



tersebut, hal ini mengakibatkan tingginya harga pangan.

Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten sebesar 100 ton sejauh ini kurang difasilitasi. Sedangkan dari kerawanan pangan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

c. Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumssi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbng dan aman. Sampai saat ini, konsumsi beras per kapita msih sangat tinggi, yaitu sekitar 90,9 kg/kap/tahun (2014). Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumbedaya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal).

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman adalah :

- 1) keterbatasan kemampuan ekonomi;
- 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi;
- 3) keterbatasan dalam mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternative pengganti beras (substitusi);
- 4) merebaknya penyalahgunan bahan kimia berbahaya



- untuk pangan;
- 5) pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
 - 6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip ekonomi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta
 - 7) pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat sehingga konsumsi pangan masih terpaku pada komoditas tertentu.

Konsumsi pangan umbi-umbian masih rendah sedangkan konsumsi beras semakin menjadi, pangan semakin strategis di masyarakat sehingga diperlukan perubahan pola pikir melalui sosialisasi gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat dengan pemnuhan sumber karbohidrat selain beras.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dari stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik. Kegiatan penganekaragaman dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sector berbagai stakeholder, apabila tidak ada dukungan dari sector lainnya tentu penganekaragaman tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penganekaragama bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, simbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan tradisional. Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran, dan teknologi pengolahan pangannya.

Pengkajian dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan adanya dukungan data yang akurat dn valid serta pelaporan yang tepat waktu bai data yang bersumber dari stakeholder lain ataupun dari kabupaten/kota. Dengan adanya data yang valid akan memudahkan dalam penyusunan kebijakan dan perumusan perencanaan dan kebijakan serta ketersediaan data dan pelaporan adalah data yang masih kurang dan kurang valid serta pelaporan yang tidak tepat waktu.



Penyebabnya sumberdaya manusia yang menangani hal tersebut masih kurang jumlahnya, data tidak rutin tercatat serta dana yang mendukung ketersediaan database masih belum ada.

Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan masih belum optimal, yang ditandai oleh : a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media masih terbatas; d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Hasil pemantauan dan evaluasi keamanan pangan meunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan antara lain :

- a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) belum dipahami dan diterapkannya cara budidaya pertanian yang baik dan benar;
- c) belum optimalnya control penggunaan pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pengawet;
- d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan hygiene dalam produksi;
- e) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk yang aman dan bermutu;
- f) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas;
- g) belum adanya laboratorium yang telah terakreditaasi;
- h) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- i) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah



sebagai impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke daerah;

- j) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;
- k) koordinasi lintas sector dan subsector terkait dengan keamanan pangan belum optimal dan
- l) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

d. Kelembagaan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan Manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoodinasi, antara lain :

- 1) Komitmen anggota Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinator dalam penanganan ketahanan pangan khususnya dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan pada Rakor DKP dirasakan masih belum dijabarkan dalam bentuk program kerja.
- 2) Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di provinsi, kabupaten/kota belum seragam, sehingga gerak manajemen kelembagaan pembangunan ketahanan pangan menjadi tidak optimal, selain itu masih ada kabupaten yang belum membentuk kelembagaan ketahanan pangan.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program kabupaten/kota.
- 4) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Yang dinilai suatu kebijakan/program kegiatan masih bersifat penilaian realiasi fisik dan keuangan, belum menyentuh akses mendalam terkait hasil dan manfaat dari kebijakan program/kegiatan sehingga akan berdampak kepada



penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

- 5) Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodic.
- 6) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- 7) Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- 8) Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal di bidang ketahanan pangan.